

Kontrol Amerika Serikat terhadap Private Military & Security Companies (PMSC) di Irak pasca Insiden Nisour Square 2007

I Putu Hadi Pradnyana¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾,
^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: hadipradnyana@unud.ac.id¹, idinfasisaka@unud.ac.id², ratihkumaladewi@unud.ac.id

ABSTRACT

United States involves Private Military & Security (PMSC) in large numbers of Iraq reconstruction missions since 2004. The existence of PMSC actually cause problems. Violations such as shootings, violence, murder, and rape of Iraqi civilians are often perpetrated by US PMSC personnel. In September 2007 there was a shooting incident of PMSC personnel and left 17 Iraqi civilians dead and 24 wounded. This incident is called the Nisour Square. Great attention came from all over to condemn the actions of the US PMSC personnel. This seems to be a whip for the US to immediately make improvements. The basic indicator of violations by PMSCs in Iraq is the lack of control mechanisms. This study discusses comprehensively the US control measures post-incident Nisour Square 2007. The explanation is based on the concept of coercive isomorphism with three parts of adjustment; categorical & structural adjustments, procedural adjustments, and personnel adjustments.

Keywords: *Private Military & Security Companies (PMSC), Iraq reconstruction, control mechanism.*

1. PENDAHULUAN

Amerika Serikat (AS) berkomitmen untuk memperkuat kontrol atas *Private Military and Security Companies* (PMSC) di Irak pasca insiden Nisour Square tahun 2007¹. Komitmen mulai diperlihatkan dari reformasi hukum PMSC yang gencar diinisiasi Kongres AS sejak tahun 2007. Alhasil pada Januari 2008, Kongres AS memberlakukan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau National Defense Authorization Act (NDAA) yang didalamnya mengatur secara spesifik

mengenai PMSC. Kerangka hukum tersebut mengikat PMSC dalam peraturan yang lebih komprehensif, sehingga tidak terkesan sebagai "*law in the books*", melainkan menjadi "*law in action*" (Lanigan n.d., p. 5 & 9). Komitmen AS dalam menguatkan kontrol terhadap PMSC sekaligus menjadi langkah penting guna meningkatkan kembali kepercayaan publik.

PMSC AS melakukan sejumlah pelanggaran di Irak hingga tahun 2007. Tepatnya pada September 2007, terjadi insiden penembakan di Nisour Square. PMSC yang terlibat pada insiden ini adalah Blackwater yang notabene mendapat kontrak langsung dari AS. Insiden yang dilakukan Blackwater ini mengakibatkan 17 warga sipil Irak meninggal dan lebih dari 24 orang lainnya

¹ *Insiden Nisour Square* adalah penembakan yang dilakukan salah satu PMSC AS yaitu Blackwater terhadap warga sipil di kota Nisour Square, Irak pada September 2007 (ICCSI, 2012).

mengalami luka-luka (ICCSI, 2012). Kongres AS melaporkan bahwa para personil Blackwater telah terlibat dalam sedikitnya 200 insiden “*escalation of force*” atau peningkatan penggunaan militer di Irak pada kurun waktu 2005 hingga 2007 (Global Research 2008). Angka ini menunjukkan dari tahun 2005 hingga 2007 PMSC melakukan banyak serangan-serangan yang terindikasi ke pelanggaran, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dsb.

Nisour Square menjadi insiden yang paling menarik perhatian publik terkait eksistensi PMSC di Irak. Pasca insiden Nisour Square, terjadi protes dari internal AS baik itu masyarakat ataupun pejabat pemerintahan. Peristiwa Nisour Square menjadi *headline* sejumlah media nasional AS maupun media internasional. Berdasarkan data Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism atau PEJ menyatakan bahwa peristiwa Nisour Square menjadi berita utama di berbagai media nasional AS ataupun internasional khususnya dalam kurun waktu 16 September sampai 05 Oktober 2007 (PEJ, 2007). Hal ini menunjukkan atensi yang besar dari publik terkait pemberitaan insiden Nisour Square. Bukan hanya publik AS, melainkan publik internasional. Besarnya pemberitaan media internasional turut membuat AS untuk meningkatkan kontrol terhadap PMSC AS di Irak.

Kritik terhadap kinerja PMSC yang buruk juga disuarakan oleh warga Irak dan masyarakat internasional. Warga Irak menilai bahwa AS kurang bertanggungjawab atas korban serta keluarga korban terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PMSC. Tidak hanya masyarakat Irak,

pelanggaran HAM yang terjadi di Irak membuat masyarakat Irak dan masyarakat internasional membentuk kelompok yang dinamakan The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI). Kelompok ini gencar mengkampanyekan agar kasus pelanggaran HAM oleh PMSC di Irak diusut tuntas (ICCSI, 2012). Desakan-desakan berbagai elemen seperti LSM menuntut AS agar mengambil langkah tepat untuk mendisiplinkan PMSC.

Lemahnya manajemen kontrol terhadap PMSC menjadi latar belakang utama terjadinya sejumlah pelanggaran. Senada dengan yang disampaikan Buzatu & Buckland (2015) bahwa penggunaan PMSC menimbulkan berbagai tantangan, salah satu yang terpenting adalah kurangnya pengawasan atau kontrol serta akuntabilitas. Permasalahan ini berkaitan dengan kemunduran sistem keamanan tradisional yang *state-centric* sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tidak dapat dijalankan secara efektif oleh negara terhadap PMSC.

Memperkuat manajemen kontrol terhadap PMSC menjadi tugas yang harus dilakukan AS terkait misi pasca invasi atau rekonstruksi di Irak. Reaksi negatif dari berbagai pihak di seluruh dunia pasca insiden Nisour Square tahun 2007 membuat otoritas AS seperti Kongres, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dll berkomitmen untuk menguatkan kontrol atas PMSC guna meminimalisir terjadinya pelanggaran di masa depan. Maka dari itu, penelitian akan membahas secara komprehensif cara-cara AS dalam memperkuat kontrol terhadap PMSC di Irak pasca insiden Nisour Square 2007.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua tulisan sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama berjudul *Privatization of the War on Drugs in Mexico and Colombia* oleh Antoine Perret tahun 2013. Secara garis besar tulisan Perret ini membahas mengenai peran *Private Military and Security Companies* (PMSC) dalam proyek-proyek pemberantasan narkoba AS di Amerika Latin khususnya Meksiko dan Kolombia. Sejak pertengahan 1970an, AS telah mengeluarkan banyak dana untuk proyek pemberantasan narkoba atau yang disebut *Antidrug Assistance Programs* (ADAPs) di kawasan Amerika Latin. Guna mendukung implementasi dari proyek ini, setiap tahun pemerintah AS mengkontrak sejumlah PMSC (Perret 2013, p. 45-46).

Penggunaan PMSC menunjukkan diziinkannya aktor non-negara dalam proyek-proyek vital suatu negara yang dalam hal ini adalah AS. Perret (2013) mengungkapkan bahwa implikasinya adalah terjadinya berbagai kekerasan dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PMSC. Hal ini dikarenakan mekanisme pengendalian serta akuntabilitas PMSC belum diregulasi secara tegas sehingga kontrol publik atas aktivitas PMSC terbatas. Kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap PMSC berdampak pada maraknya pelanggaran HAM yang dilakukan personil PMSC terhadap warga sipil.

Tulisan pertama membantu penelitian ini dalam mengamati keterlibatan, pelanggaran-pelanggaran, serta tidak mampunya negara dalam mengontrol PMSC. Untuk melihat bentuk-bentuk kontrol yang dapat dilakukan negara guna mengontrol

PMSC, penelitian ini menggunakan tulisan lain yang berjudul *The UK and the Regulation of PMSC* karya Nigel D. White sebagai kajian pustaka.

Secara garis besar, White (2005) membahas cara-cara yang dilakukan pemerintah Inggris dalam mengontrol PMSC. Kontrol ini penting guna meningkatkan standarisasi dan profesionalitas dari seluruh PMSC Inggris baik yang beroperasi di dalam ataupun luar teritori Inggris. Dengan adanya kontrol yang komprehensif, Inggris meyakini bahwa angka pelanggaran yang disebabkan oleh para personil PMSC dapat diminimalisir. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan membentuk *Security in Complex Environments Group* (SCEG) pada tahun 2011. SCEG menjadi mitra pemerintah Inggris dalam mengembangkan dan mengakreditasi standarisasi sektor keamanan swasta di Inggris dibawah PMSC.

Tulisan White (2005) berkontribusi pada penelitian ini guna melihat kontrol yang dapat dilakukan negara terhadap aktivitas PMSC sehingga kasus-kasus pelanggaran dapat diminimalisir. Dengan penguatan mekanisme kontrol terutama melalui SCEG dan *self-regulation*, membuka peluang besar bagi PMSC di Inggris bekerja menggunakan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi nasional dan internasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penguatan kontrol AS atas PMSC di Irak merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat diteliti melalui metode kualitatif.

Unit analisis yang digunakan adalah negara. Negara dipergunakan sebagai unit analisis dikarenakan penelitian ini akan

memaparkan secara komprehensif mengenai keterlibatan negara, dalam hal ini AS dalam mengontrol PMSC di Irak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter dan penelusuran *online*. Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data melalui penelusuran data historis seperti otobiografi, buku-buku catatan, kliping, dokumen resmi pemerintah atau swasta, data yang tersedia di situs-situs terpercaya, dan dokumen lainnya.

Sementara metode dokumenter diperoleh dari situs-situs resmi pemerintahan AS seperti Congressional Budget Office, Congressional Research Service, United States Government Information, United States Accountability Office, dll. Sedangkan penelusuran *online* diperoleh dari jurnal *online* yang membahas fenomena serupa seperti karya Deborah Avant dan Sigelman Lee yang berjudul *Private Security and Democracy: Lessons from the US in Iraq*, jurnal karya Thomas Bruneau yang berjudul *The US in Contracting out Security and Lessons for other Countries*, dan jurnal-jurnal lain.

Data kemudian dianalisis dengan perspektif non-positivistik. Non-positivistik maksudnya adalah dengan menginterpretasi dan mengkritisi suatu isu atau fenomena (Somantri, 2005). Interpretasi dan kritik diperoleh melalui makna intrinsik suatu kejadian, sikap, percakapan, dan hal empiris lainnya (Neuman, 1997).

4. PEMBAHASAN

Militer dan keamanan pada era ini tidak hanya menjadi kewenangan negara. Perkembangan liberalisasi yang pesat turut membuat isu militer dan keamanan menjadi entitas bisnis yang dapat dikuasai oleh

kalangan sipil atau aktor non-negara. Berbagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa militer dan keamanan privat yang dikenal dengan sebutan PMSC telah banyak bermunculan, terutama di AS dan negara-negara Eropa. Kapabilitas yang dimiliki atau ditawarkan oleh berbagai PMSC pun beragam, bahkan bisa menandingi kapabilitas militer sebuah negara. Dengan kata lain, eksistensi PMSC pada beberapa waktu ke belakang cukup kuat. P.W. Singer (Singer 2001, p.186) menekankan bahwa saat ini penyedia kebutuhan keamanan tidak datang dari negara atau organisasi internasional, namun berada di tangan pasar yakni PMSC.

Rachmat (2015, p. 147-149) menjelaskan bahwa Private Military & Security Companies (PMSC) mencakup dua jenis perusahaan yaitu Private Military Company (PMC) dan Private Security Company. PMC secara khusus didefinisikan sebagai perusahaan swasta yang menyediakan jasa keterampilan militer seperti operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, pelatihan, serta pengadaan dan perawatan senjata atau peralatan. Sedangkan PSC adalah penyedia jasa keamanan dan perlindungan personil ataupun harta benda yang mencakup aset kemanusiaan serta industri. Dengan demikian, PMSC merupakan gabungan dari dua kategori perusahaan yang pada dasarnya sama-sama menyediakan jasa keamanan dan militer.

AS menjadi negara yang memiliki PMSC paling banyak. Dengan kata lain, terdapat banyak PMSC yang berbasis dan berbadan hukum di AS, seperti Blackwaters,

Airscan, Executive outcome, Sandline International, Military Professional Resources Inc (MPRI), Meyer & Associate, Kellog Brown and Root (KBR), dll. Sebagian besar pendiri dari beberapa PMSC tersebut adalah mantan marinir atau militer AS. Seperti Airscan yang didirikan oleh mantan personil AU AS pada tahun 1984. Meski dianggap *Multi National Corporation* (MNC) dan kerap mendapatkan misi atau kontrak di luar teritori AS, PMSC yang berbasis di AS hanya memiliki markas di AS. Seperti Blackwaters yang bermarkas hanya di California Utara (Rachmat 2015, p. 154 & 155). Maka dari itu seluruh PMSC yang berbasis di AS secara teori diwajibkan tunduk pada hukum nasional AS. Saat personil PMSC melakukan pelanggaran di negara lain, maka yang bersangkutan tidak berstatus kombatan.

Salah satu misi AS yang melibatkan PMSC dalam skala besar adalah rekonstruksi Irak atau pasca invasi Irak. US Congressional Budget Office (2008, p. 4) melaporkan bahwa pemerintah AS telah mengalokasikan dana sebesar 3-4 miliar US Dollar pada tahun 2003 sampai 2007 untuk membiayai sejumlah PMSC yang dilibatkan pada rekonstruksi Irak. AS pun telah menerjunkan 180.000 personil PMSC yang berkolaborasi dengan 160.000 militer AS dalam misi serupa pada tahun 2007 (Nimkar n. d., p. 10). Jumlah tersebut mengindikasikan besarnya peran PMSC dalam misi militer AS di Irak. Charles Tiefer, seorang professor Government Contracting di Sekolah Hukum Universitas Baltimore sekaligus anggota Komisi Independen AS yang khusus mempelajari PMSC Irak, mengatakan misi militer AS di Irak sebagai

“the first war that the United States has fought where so many of the people and resources involved aren’t of the military, but from contractors” (Risen, 2008). Dengan kata lain, Tiefer menekankan bahwa misi militer AS di Irak merupakan “perang” pertama AS dengan sumber daya yang terlibat bukan dari militer, melainkan PMSC.

Pelanggaran PMSC AS di Irak terjadi karena lemahnya kontrol AS terhadap entitas tersebut, baik dalam hal kebijakan peradilan dan pengawasan lapangan. Maka dari itu AS melakukan langkah-langkah pembenahan kontrol yang dapat dijelaskan melalui konsep koersif isomorfisme. Tiga penyesuaian dalam koersif isomorfisme yang dikemukakan DiMaggio & Powell (1983) adalah kategorial & struktural, prosedural, dan personil.

Penyesuaian kategorial dan struktural menjelaskan ketika negara menetapkan aturan-aturan institusional (regulasi) dan mengarahkan organisasi membentuk struktur yang sesuai dengan aturan tersebut. Terkait dengan ini, AS mengeluarkan undang-undang National Defense Authorization Act (NDAA) pada tahun 2008. UU ini menjadi fondasi penting bagi AS untuk meningkatkan kontrol terhadap PMSC di Irak. Selain mengarahkan PMSC agar tidak melakukan pelanggaran, UU ini memberikan legitimasi kepada PMSC untuk mendapatkan kontrak. PMSC dapat tetap beroperasi secara legal bahkan pada misi-misi tempur sekalipun, namun harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh AS.

Penyesuaian prosedural dilakukan guna mencapai standar prosedur pengoperasian

yang dengan paksa dilakukan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pembentukan suatu lembaga yang bertugas mengawasi kontrak yang ditetapkan otoritas AS seperti Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Dibentuknya lembaga bersangkutan diharapkan dapat mengawasi PMSC secara lebih efektif dan sesuai fakta lapangan. Terkait peyesuaian ini, lembaga yang dibentuk adalah Commission on Wartime Contracting (CWC) pada tahun 2008 (United States Government Information, 2009).

CWC berada di bawah Kongres sehingga segala bentuk laporan akan diserahkan kepada Kongres. Anggota CWC terdiri dari kalangan akademisi yang independen, perwakilan partai Republik dan Demokrat, Government Accountability Office (GAO), the Congressional Research Service (CSR), the Commission on Army Acquisition and Management in Expeditionary Operations (Gansler Commission), dan NGO yang berkaitan. CWC juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi di Irak guna memudahkan penyelidikan, yakni Special Inspector General for Iraq Construction, Inspectors General for Department of Defense, Department of State, dan U.S. Agency for International Development (United States Government Information, 2009). Hal ini menunjukkan profesionalitas dan independensi CWC sehingga kinerja di lapangan dapat efektif.

AS membentuk CWC untuk mengawasi secara langsung aktivitas personil PMSC di lapangan. Regulasi yang telah dikeluarkan yaitu NDAA 2008 tidak akan efektif apabila tidak ada pengawasan yang substantif. CWC

menjadi perpanjangan AS untuk melihat, mengamati, dan melaporkan berbagai aktivitas personil PMSC selama bertugas di Irak. Jika personil PMSC melakukan pelanggaran, baik berupa penembakan, pemerksaan, penganiayaan, dsb maka CWC dapat dengan cepat mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke otoritas AS. Pengawasan oleh CWC diharapkan membuat personil PMSC tidak bertindak bebas dan tanpa aturan sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

Bagian terakhir dari konsep koersif isomorfisme adalah penyesuaian personil. AS tidak akan dapat melakukan kontrol yang tepat hanya dengan membenahi regulasi dan membentuk badan pengawas. Satu indikator yang cukup mendasar dari pelanggaran-pelanggaran PMSC adalah kualitas personil. Membahas kualitas personil erat kaitannya dengan skema rekrutmen personil PMSC. Mengatasi permasalahan ini, AS pada tahun 2012 memberlakukan skema rekrutmen personil PMSC yang baru bernama Federal Acquisition Certification for Contracting Officer's Representatives (FAC-COR).

Sebelum dibentuk FAC-COR, AS melakukan rekrutmen personil PMSC melalui International Transfer of Arms Regulations (ITAR). Lisensi tersebut menjadi syarat utama untuk mengatur PMSC yang beroperasi di luar negeri agar bekerja sesuai dengan kepentingan nasional AS (Dumlupinar 2010, p. 59).

Nihat Dumlupinar (2010, p. 59) mendeskripsikan bahwa sistem tersebut memiliki kelemahan regulasi yang mendasar. Hal ini menyebabkan kinerja PMSC tidak sesuai dengan visi AS yang secara langsung

juga membuka celah-celah pelanggaran. Dumpludinar (2010) menjelaskan terdapat tiga masalah utama dalam proses perekrutan PMSC melalui ITAR. Pertama, kriteria pemilihan PMSC yang tidak jelas, yakni mengabaikan latar belakang PMSC yang akan dikontrak. Bahkan AS juga membebaskan alur pendaftaran dan lisensi bagi PMSC dengan basis di luar AS. Dengan kata lain, ITAR tidak memiliki mekanisme pengecekan bagi PMSC asing dalam proses kontrak.

Steve Fainaru (2008) dalam Dumpludinar (2010, p. 60) juga menjelaskan kelemahan sistem perekrutan PMSC di AS. Fainaru (2008) tegas mengatakan bahwa persyaratan pekerjaan untuk PMSC sama sekali tidak jelas. Berdasarkan hasil studi di Irak, Fainaru mendapatkan adanya oknum PMSC yang dalam bertugas dilarang membawa senjata api, justru dengan mudah beroperasi di Irak dengan membawa granat dan senjata api. Fainaru bahkan mendapatkan petugas medis (Emergency Medical Technician) yang tidak bersertifikat.

Permasalahan kedua terletak pada proses penawaran kontrak. Perekrutan PMSC yang tidak jelas kemudian berpengaruh pada penawaran kontrak antara pemerintah dan PMSC. Dalam hal ini, AS melalui FAR (Federal Acquisition Regulation)²

² Federal Acquisition Regulation (FAR) merupakan serangkaian peraturan yang melibatkan lembaga eksekutif dalam penyediaan anggaran untuk layanan dan pengadaan. Secara lebih spesifik, FAR mengatur proses akuisisi dari seluruh lembaga eksekutif AS untuk memperoleh (baik bersifat membeli atau menyewa) barang serta jasa berdasarkan kontrak dan dana yang disesuaikan (FAR, 2005).

mengecualikan persaingan penuh dan terbuka bagi PMSC yang akan dikontrak pada misi Irak (Waxman, 2006 dalam Dumpludinar 2010, p. 62) padahal persaingan PMSC sangat penting demi mendapatkan layanan terbaik dengan nilai terbaik pula. Persaingan penuh, terbuka, dan kompetitif bagi penyedia layanan khususnya PMSC telah diatur pada The Competition in Contracting Act tahun 1984, yang menyatakan bahwa badan-badan federal harus melangsungkan persaingan terbuka bagi setiap penyedia layanan dengan menggunakan prosedur kompetitif (United States Code 41, n. d.). FAR pun menyatakan hal serupa, bahwa setiap PMSC harus melewati persaingan penuh dan terbuka melalui prosedur kompetitif yang sesuai dengan aksi kontrak dan konsisten terhadap kebutuhan pemerintah AS. Selanjutnya, kontrak harus diberikan kepada sebanyak sepuluh PMSC dalam rangka memberikan persaingan harga yang efektif dan sesuai akan fungsi serta tugas yang dilimpahkan AS (Waxman, 2006 dalam Dumpludinar 2010, p. 62).

Ketiga adalah masalah jenis kontrak. ITAR mengklasifikasikan kontrak dalam dua kategori besar, yakni *fixed-price contracts* dan *cost-reimbursement contracts*. *Fixed-price contract* digunakan untuk misi dengan risiko minimal atau bisa diprediksi. Sedangkan *cost-reimbursement contracts* diperuntukkan bagi PMSC dengan risiko kinerja tinggi dan tidak bisa diprediksi (Dumpludinar 2010, p. 62). AS menggunakan tipe *cost-reimbursement contracts* bagi PMSC yang bertugas di Irak. Dalam hal ini, pemerintah AS menyetujui semua biaya PMSC dalam melaksanakan

misi yang meliputi *cost contracts*, *cost-sharing contracts*, *cost-plus-incentive-fee contracts*, *cost-plus-award fee contracts*, dan *cost-plus fixed fee contracts*. Pemerintah AS menghabiskan sekitar \$162 miliar untuk membayar PMSC dengan tipe kontrak tersebut pada tahun 2005 (Grasso 2010, p. 20).

Ketiga masalah di atas jelas memperburuk kinerja PMSC di Irak. Tidak jelasnya kriteria perekrutan PMSC membuat kinerja PMSC tidak sesuai kompetensi. Selanjutnya, tidak adanya persaingan PMSC di Irak yang kompetitif menyebabkan hanya terdapat satu PMSC dominan. Terakhir, penentuan tipe *cost-reimbursement contracts* bagi PMSC di Irak mendorong PMSC bertindak curang, yakni dengan menentukan *overhead cost* dari biaya seharusnya. Ketiga hal tersebut membuat kinerja PMSC tidak berkualitas, merugikan AS, dan dengan demikian tidak sesuai kontrak kerja.

Lemahnya sistem rekrutmen personil PMSC AS melalui ITAR memaksa AS untuk membuat skema rekrutmen baru yang lebih profesional. Peningkatan kualitas PMSC yang dimandatkan FAC-COR berarti meningkatkan standar personil PMSC. Dengan kata lain, personil PMSC yang ingin mendapatkan tugas dan kontrak harus memenuhi semua prosedur yang dituangkan dalam FAC-COR. Hal ini cukup kontras dengan mekanisme kontrak sebelumnya yang terkesan tidak selektif dan menerima personil tanpa menimbang kualitas.

Rekrutmen personil PMSC melalui skema FAC-COR menjadi realisasi dari butiran penyesuaian personil dalam konsep

koersif isomorfisme. Menurut DiMaggio & Powell (1983) organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi disertai dengan sertifikat profesional. Personil dalam organisasi tersebut harus memenuhi kualifikasi melalui sertifikat sebagai sumber legitimasi. Mengedepankan personil yang berpendidikan dan bersertifikat menandakan organisasi yang modern, bertanggungjawab, serta menggunakan kriteria rasional dalam menyeleksi dan mempromosikan personilnya. Berkaitan dengan ini, penelitian akan melihat sertifikasi personel yang dibenahi oleh otoritas AS terhadap PMSC. Mengeluarkan sertifikat kerja terhadap personel PMSC yang lebih tegas dan profesional menjadi hal yang perlu dilakukan demi menguatkan kontrol terhadap PMSC.

5. KESIMPULAN

Insiden Nisour Square 2007 menjadi momentum AS untuk melakukan berbagai langkah pembenahan dalam mengontrol PMSC di Irak. Insiden yang mengakibatkan 17 warga sipil Irak meninggal dan lebih dari 24 orang lainnya mengalami luka-luka tersebut (ICCSI, 2012) mengundang kritik negatif dari media dan masyarakat internasional. Kontrol yang lemah menjadi indikator utama dari masalah ini (Buzatu & Buckland, 2015, p. 18-19). Guna menjelaskan langkah-langkah penguatan kontrol yang dilakukan AS, penelitian ini menggunakan landasan konsep Koersif Isomorfisme yang mengklasifikasikan kontrol menjadi tiga jenis; 1) penyesuaian struktural dan kategorial, 2) penyesuaian prosdural, dan 3) penyesuaian personil.

Penyesuaian kategorial dan struktural menjelaskan ketika negara menetapkan aturan-aturan institusional dan mengarahkan organisasi membentuk struktur yang sesuai dengan aturan tersebut. Pada bagian ini, AS menerapkan undang-undang yang disebut National Defense Authorization Act (NDAA) 2008. UU ini menjadi dasar kontrol terhadap PMSC khususnya di Irak. Kemudian

penyesuaian prosedural dilakukan guna mencapai standar prosedur pengoperasian yang dengan paksa dilakukan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pembentukan suatu lembaga yang bertugas mengawasi kontrak yang ditetapkan. Pada bagian ini, AS tahun 2008 membentuk komisi yang bernama Commission on Wartime Contracting (CWC). Komisi tersebut memiliki peran dan tugas penting karena mengawasi langsung kegiatan-kegiatan PMSC AS di Irak. Selain itu, CWC juga bertugas melakukan audit terkait anggaran-anggaran yang masuk ke PMSC. Terakhir adalah penyesuaian personil yakni meningkatkan kompetensi dan standardisasi dari setiap personil PMSC yang ditugaskan. Pada bagian ini, AS mengeluarkan program FAC-COR yang merupakan program pemerintah Federal AS (di bawah naungan Departemen Pertahanan) dalam mengelola PMSC. FAC-COR berlaku mulai 1 Januari 2012 dan menjadi program sertifikasi kepada PMSC yang dilaksanakan oleh CORs, agar PMSC yang dikontrak memenuhi syarat serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, NDAA 2008 (penyesuaian struktural dan kategorial), CWC (penyesuaian prosedural), dan FAC-COR (penyesuaian personil) menjadi jawaban AS terkait penguatan kontrol

atas PMSC di Irak pasca insiden Nisour Square 2007.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rachmat, Angga Nurdin. (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon W. (2002). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press.
- Avant Deborah & Sigelman Lee. (2010). Private Security and Democracy: Lessons from the US in Iraq. *Security Studies*, 19(2), 230-265. Retrieved from https://mitt.uib.no/files/150302/download?download_frd=1&verifier=ZzqbN48qrduucSuF4nIF1C3lrCUXXLQw0ekQgc.
- DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, Volume 48, Issue 2, p. 147-160. Retrieved from https://www2.bc.edu/candace-jones/mb851/Mar26/DiMaggioPowell_ASR_1983.pdf.
- Irvin, Grayson. (2011). Rethinking the role and regulation of private military companies: what the United States

- and United Kingdom can learn from shared experiences in the war on terror. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 39(2), 446-470. Retrieved from <http://digitalcommons.law.uga.edu/gjic/vol39/iss2/7>
- Perret, Antoine. (2013). *Privatization of the War on Drugs in Mexico and Colombia*. *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law*. Vol. 7(1). 46-57. Retrieved from http://www.americanstudents.us/content/uploads/2013/10/Perret_Proof_8_7_13.pdf.
- Singer, P.W. (2001). Corporate warriors: the rise of privatized military industry and its ramifications for international security. *International Security*, 26(3). Retrieved from <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20020128.pdf>.
- Buzatu, Anne-Marie & Bucklan, Benjamin S. (2015). *Private Military & Security Companies: Future Challenges in Security Governance*. DCAF Horizon Working Paper No. 3. Retrieved from <http://www.dcaf.ch/content/download/35852/526921/file/PMSC%20web%20version.pdf>.
- Dumlupinar, Nihat. (2010). Regulation Of Private Military Companies In Iraq. Retrieved from https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5452/10Mar_Dumlupinar.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Fainaru, Steve. (2008). New York: Da Capo Press. *Big Boy Rules: America's Mercenaries Fighting in Iraq*. Retrieved from https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5452/10Mar_Dumlupinar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Isenberg, David. (2009). Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy. Retrieved from <https://www.files.ethz.ch/isn/109297/Isenberg%20Private%20Military%20Contractors%20PRIO%20Report%201-2009.pdf>
- Isenberg, David. (2009). London: Praeger Security International. *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*. Retrieved from https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5452/10Mar_Dumlupinar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Lanigan, Kevin. (n.d.). *Legal Regulation of PMSCs in the United States: The Gap between Law and Practice*. Retrieved from <http://www.privatesecurityregulation.net/files/Microsoft%20Word%20-%20PMSC%20Article,%20US,%20Kevin%20Lanigan,%20Final.pdf>.
- Lindemann, Marc. (2007). Civilian Contractors under Military Law. Retrieved from strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/07autumn/lindemann.pdf

- Loverdos, Jordi Palou & Armendariz, Leticia. (2011). *The Privatization of Warfare, Violence and Private Military & Security Companies: A Factual and Legal Approach to Human Rights Abuses by PMSC in Iraq*. Retrieved from www.consciousbeingalliance.com/Info_rme_PMSC_Iraq_Nova.pdf
- Lindahl, Jorgen. (2015). Understanding the American Use of Private Military Contractors: Threats to the American Democratic Model Through Lack of Accountability and Transparency in the Outsourcing of American Military Functions. Retrieved from <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44845/Lindahl-Master.pdf?sequence=7>
- Nimkar, Ruta. (n. d.). *From Bosnia to Baghdad the Case For regulating Private Military and Security Companies*. Retrieved from jpia.princeton.edu/sites/jpia/files/2009-1.pdf
- Pew Research Center. (2007). *The Murky Blackwater Story Fuels Iraq Coverage*. Retrieved from <http://www.journalism.org/2007/10/09/pej-news-coverage-index-sept-30-oct-5-2007/>
- Powell, W. Walter. (2007). *The New Institutionalism*. Retrieved from web.stanford.edu/group/song/papers/NewInstitutionalism.pdf
- White, Nigel D. (2015). *The UK and the Regulation of PMSCs*. Retrieved from <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Event2015/NigelWhite.pdf>
- Congressional Budget Office. (2008). Contractors' Support of U.S. Operations in Iraq. Retrieved from <http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/96xx/doc9688/08-12-iraqcontractors.pdf>
- Congressional Research Service. (2008). Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues. Retrieved from <https://fas.org/sqp/crs/natsec/RL32419.pdf>
- FAR. (2005). Federal Acquisition Regulation. Retrieved from <https://www.acquisition.gov/sites/default/files/current/far/pdf/FAR.pdf>
- Federal Acquisition Institute. (n.d.). FAC-COR Requirements. Retrieved from <https://www.fai.gov/drupal/certification/fac-cor>
- Federal Acquisition Regulation. (2009). *Full and Open Competition*. Retrieved from https://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%206_1.html accessed
- United States Government Accountability Office. (2009). DOD, State, and USAID Continue to Face Challenges in Tracking Contractor Personnel and Contracts in Iraq and Afghanistan. Retrieved from

<https://www.gao.gov/new.items/d101.pdf>

United States Government Information.
(2009). Commission On Wartime Contracting: Interim Findings And Path Forwar. Retrieved from <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111hrg51899/pdf/CHRG-111hrg51899.pdf>